



kendali mesti diganti dengan yang lebih muda. Regenerasi yang melahirkan nama-nama seperti KH Abdurrahman Wahid, Mahbub Djunaedi, Fahmi Saifuddin dan seterusnya, dilatarbelakangi oleh permasalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar kemestian untuk melaksanakan mekanisme suksesi kepengurusan. *Backdrop* proses ini adalah berkaitan dengan maraknya konflik internal NU di masa sebelumnya, yang kurang lebih terpola sebagai konflik antara kelompok politisi dan ulama non-politisi yang secara populer disebut sebagai konflik Cipete-Situbondo.

Konflik yang nyaris akut ini pada akhirnya melahirkan kesadaran para ulama dan warga NU akan perlunya pemunculan figur baru dalam teras kepemimpinan NU. Figur baru itu harus berada pada posisi netral dalam peta konflik NU, di samping harus mampu menjadi representasi semangat khittah. Berdasarkan kriteria ini maka tujuh orang kiai senior NU yang dikomandani KH As'ad Syamsul Arifin dalam forum *shulū halli wal 'aqdi* menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Tanfidziyah. Tokoh ini bukan saja netral, tapi ia juga secara serius telah turut mengupayakan rekonsiliasi kedua kubu yang bersengketa di era sebelumnya. Selanjutnya, ia adalah seorang figur



















tepat untuk memimpin NU. Mereka memiliki latar belakang yang kosmopolit, karenanya tidak canggung dalam mengantisipasi modernisasi. Sementara mereka pada saat yang sama juga memiliki akar kuat dalam tradisi ke-NU-an, maka mereka menjadi sangat paham bagaimana mengkomunikasikan proses modernisasi dalam idiom-idiom yang dipahami oleh warga NU sendiri. Sementara untuk memasuki era berbangsa secara utuh, sesuatu yang dalam wawasan keislaman telah *diback up* dengan konsep *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), maka merekalah yang paling mampu berdialog dengan berbagai pihak dari berbagai latar-belakang yang beraneka ragam.

#### B. Menuju Reorientasi Politik NU

Keputusan organisasi NU untuk kembali pada khittah 1926, yang ditandai dengan melepaskan keterikatan baju politik praktis, bisa dilihat sebagai strategi untuk menghadapi realitas yang ada. Perlu di catat di sini bahwa perdebatan-perdebatan yang berlangsung sebelum Muktamar NU ke-27 di Sitbono menandai keputusan itu lahir dari proses panjang termasuk di dalamnya wacana publik (*public discourse*) di mass media dan forum-forum diskusi. Hal ini, satu sisi mengusahakan pemecahan persoalan internal. Lain pihak menunjukkan kemampuan

organisasi ini untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang akan berdampak luas bagi perkembangan NU sendiri. Lebih dari itu, NU menjadi organisasi sosial keagamaan yang berpotensi untuk bermanuver secara mandiri di tengah organisasi sosial di Indonesia mengalami kemacetan, kooptasi dan ketergantungan yang besar pada negara.

Setelah NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan, bukan berarti NU menjadi penonton di luar arena percaturan politik. Justru sebaliknya. Organisasi ini dalam konteks politik Orde Baru malah dianggap oleh para pengamat berhasil menempatkan posisi yang lebih strategis. Sebagai wacana praksis politik, NU kembali ke khittah 1926 dapat dilihat sebagai strategi untuk memperluas kembali ruang politik (*political sphere*) yang semakin menyempit di bawah dominasi negara. Alhasil NU kini tampak lebih bebas dalam menyalurkan aspirasi politik, lewat semua peserta Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Kendati pada arus politik mutakhir, di era reformasi pasca lengsernya rezim Orde Baru, NU turut serta mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi hal ini bisa dilihat sebagai salah satu hasil refleksi NU dalam upaya kembali ke khittah yaitu perumusan kembali pemahaman terhadap politik dan agenda



ideologis NU berangkat dari kerangka ajaran Islam, yang memiliki nilai universal mengatasi ruang dan waktu. Namun visi tersebut kemudian diletakkan dalam suatu konteks historis dan struktural yang konkrit agar senantiasa relevan, aktual dan mampu menjadi landasan tumpu bagi keberadaannya.

Salah satu implikasi dari refleksi ideologis tersebut adalah penolakan tegas organisasi ini untuk mempertentangkan antara Islam dan Negara yang berdasarkan appropriasi pemahaman fundamentalistik dan pendekatan legal formalistik dalam upaya legitimasi ideologis dan praksis politik. Pandangan fundamentalistik tentang hubungan agama dan negara memiliki latar kesejarahan yang cukup panjang di Indonesia, bukannya tidak pernah diterima oleh NU atau setidaknya NU pernah pula berada dalam posisi mendukung, seperti dalam sidang-sidang konstituante yang memperdebatkan tentang dasar negara RI.<sup>14</sup> Demikian juga sikap-sikap wakil-wakil NU di DPR dalam menghadapi kasus seperti aliran kebatinan dan asas tunggal yang menunjukkan masih kuatnya elemen-elemen

---

<sup>14</sup>Sikap NU dalam sidang Konstituante diuraikan oleh Chairul Anam, *Profil Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Sosial Keagamaan Yang Berhaluan Ahlul-sunnah wal Jamaah* (Skripsi: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1983) h. 316-319.

ideologis yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman legal formalistik.

Pada arus praksis, rumusan NU di atas menandai upaya reorientasi model kepolitikan dari yang hanya bersifat taktis menuju sebuah praksis politik yang substansial dan strategis. Seperti, didirikannya sejumlah program NU yang menuju pada arus pemberdayaan sumber daya manusia. Yaitu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM), di bawah PWNU DIY, dan Lakpesdam yang merintis pembuatan Pusat Dokumentasi NU.

Menjadi jelas bahwa upaya reorientasi ideologi dan praksis yang tertulis dalam wacana politik baru NU muncul sebagai hasil dari proses dialektis antara kekuatan masyarakat dan negara. Disatu pihak, NU mencerminkan suatu upaya penemuan kembali identitas (*the recovery of identity*) yang meliputi penafsiran ulang perangkat-perangkat penting yang dipakai sebagai landasan pergerakan organisasi dan juga upaya redefinisi peran dan fungsinya dalam struktur politik-ekonomi yang ada. Dipihak lain juga merupakan jawaban strategis terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perombakan mendasar dalam format politik-ekonomi Indonesia di bawah Orde Baru yang tak ayal lagi menempatkan NU dalam posisi yang semakin melemah dan defensif.